



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

INSPEKTORAT

Alamat : Jl. Indah No. 1 Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914

Telp. (021) 875 6565 Fax. (021) 8756565

Laman : inspektorat.bogorkab.go.id, Pos-el: inspektorat@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 000.5.6.2/KPTS.INSPT/2026

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR
700.1/465/Kpts/PerUU/2025 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT TAHUN 2026

INSPEKTUR KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 700.1/465/Kpts/PerUU/2025, tanggal 19 Desember 2025, tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2026, Bupati Bogor telah menetapkan jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan Diktum Keempat Keputusan Bupati Bogor Nomor 700.1/465/Kpts/PerUU/2025, tanggal 19 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2026, apabila dalam pelaksanaan terdapat perubahan kebijakan dan/atau mandatori khusus dari kementerian maupun dari instansi teknis terkait, maka jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat diubah tanpa harus mengubah Keputusan Bupati dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko pada Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 49 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 396);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (ND Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Bogor Nomor 700.1/465/Kpts/PerUU/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Inspektur ini.
- KEDUA : Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Bogor Nomor 700.1/465/Kpts/PerUU/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2026, sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 15 April 2026

INSPEKTUR,



ARIF RAHMAN, S.H., M.H., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19750723 200212 1 008

NO	JENIS	URAIAN	TUJUAN	RUANG LINGKUP	ITBAN PENGAMPU	JADWAL PENUGASAN												
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
57	Audit	AUDIT DESA PUTARAN II	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Penyaluran Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa dan Dana Desa sebagai Bentuk dari Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	4 Desa Kecamatan Cariu (Desa Karyamekar, Desa Mekarwangi, Desa Sukajadi, Desa Babakan Raden)	IV					27 Apr - 13 Mei								
58	Audit			4 Desa Kecamatan Sukamakmur (Desa Sukamulya, Desa Sukaharja, Desa Pabuaran, Desa Sukadamai)	IV				April - Mei									
59	Audit			4 Desa Kecamatan Tanjungsari (Desa Antajaya, Desa Sirnarasa, Desa Cibadak, Desa Tanjungsari)	IV				April - Mei									
60	Audit	Audit Desa Putaran II	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Penyaluran Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa dan Dana Desa sebagai bentuk dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	5 Desa pada Kec. Cibungbulang (Desa Ciaruteun Ilir; Desa Leuwih Kolot ; Desa Situ Ilir ; Desa Cimanggu I; Desa Galuga)	I - IV					4 Mei - 29 Mei								
				4 Desa pada Kec. Cisarua (Desa Jogjogkan; Desa Cibeureum; Desa Cileumbeur; Desa Kopo)					4 Mei - 29 Mei									
				4 Desa pada Kec. Parung (Desa Pameugeur Sari; Desa Jabonmekar; Desa Bojongsempu; Desa Cogrek)					4 Mei - 29 Mei									
61	Monev	Monitoring dan Evaluasi Terhadap Program Strategis Nasional	Memantau Program Strategis Nasional Terkait Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Proyek Pembangunan 3 Juta Rumah	Bapperida dan DPKP	II					18 Mei - 03 Jun								
62	Reviu	REVIU RA RPKD 2027	Kesesuaian RPKD dengan RPJMD	Bapperida	II					18 Mei - 03 Jun								
63	Audit	AUDIT DESA PUTARAN III	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Penyaluran Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa dan Dana Desa sebagai Bentuk dari Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	3 Desa Kecamatan Babakan Madang (Karang Tengah, Kadumanggu, Babakan Madang)	I-IV					20 Mei - 04 Jun								
64	Audit			3 Desa Kecamatan Tenjo (Singabraja, Singabangsa, Batok)	I-IV					20 Mei - 04 Jun								
65	Audit			3 Desa Kecamatan Cijeruk (Cipicung, Tanjungsari, Sukaharja)	I-IV					20 Mei - 04 Jun								
66	Audit	AUDIT DESA PUTARAN III	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Penyaluran Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa dan Dana Desa sebagai Bentuk dari Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	5 Desa Kecamatan Leuwiliang (Desa Barengkok, Desa Karehkel, Desa Cibeber II, Desa Pabangbon)	IV					Mei - Jun								
67	Audit			4 Desa Leuwisadeng (Desa Sibanteng, Desa Leuwisadeng, Desa Sadeng Kolot, Desa Kalong II)	IV					Mei - Jun								
68	Reviu	REVIU SHS TAHUN 2027 (SSH BARJAS DAN SBU)	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026 telah disusun dalam batas kewajaran sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung SHS serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan	Asisten Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah	IV					Mei - Jun								
69	Fasilitasi	FASILITASI PENYUSUNAN RISK REGISTER TAHUN 2027	Membekali risk owner dan fasilitator dengan kemampuan mengidentifikasi, menilai, dan menyusun dokumen risiko sesuai pedoman yang berlaku	76 Perangkat Daerah	IV						Jun							
70	Audit	Audit Desa Putaran III	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Penyaluran Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa dan Dana Desa sebagai bentuk dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	5 Desa pada Kec. Nanggung (Desa Kalongliut; Desa Pangkaljaya; Desa Batutulis; Desa Nanggung; Desa Sukaluyu)	I - IV						2 Jun - 30 Jun							
				5 Desa pada Kec. Pamijahan (Desa Gunungbunder II; Desa Cimayang; Desa Pamijahan; Desa Cibitungkulon; Desa Gunungsari)						2 Jun - 30 Jun								
				5 Desa pada Kec. Sukajaya (Desa Urug; Desa Jayaraharja; Desa Cisarua; Desa Klarapanda; Desa Pasirmadang)						2 Jun - 30 Jun								

NO	JENIS	URAIAN	TUJUAN	RUANG LINGKUP	ITBAN PENGAMPU	JADWAL PENUGASAN												
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
71	Monitoring	Monitoring Tindak Lanjut Inspektorat II	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Seluruh entitas yang diperiksa	I-IV						2 Jun - 4 Jun							
72	Evaluasi	PK SPIP-TERINTEGRASI	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan aset pemerintah dilakukan dengan baik, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	12 Perangkat Daerah	III						02 Jun - 30 Jun							
73	Audit	AUDIT DESA PUTARAN III	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Bantuan Keuangan pada Desa-Desa di Kabupaten Bogor	Kec. Jonggol (Ds. Singajaya, Ds. Sukasirna, Ds. Sukamaju, Ds. Singasari, Ds.Cibodas)	II						08 Jun - 29 Jun							
74	Audit	AUDIT PERANGKAT DAERAH II	Memproleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	Damkarmat	II						08 Jun - 29 Jun							
75	Audit	AUDIT BUMD	Pemeriksaan bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan usaha unit bisnis dan kinerja pada BUMD telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	BPRS Parung Panjang	II						08 Jun - 29 Jun							
76	Reviu	REVIU TATA KELOLA PERIZINAN	Memperoleh keyakinan terbatas bahwa tata kelola perizinan telah dilaksanakan sesuai ketentuan	DPMTSP	III						15 Jun - 24 Jun							
77	Audit	AUDIT DESA PUTARAN IV	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Penyaluran Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa dan Dana Desa sebagai Bentuk dari Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	4 Desa Kecamatan Ciampea (Desa Tegalarwu, Desa Cihideunghilir, Desa Cibanteng, Desa Ciampea)	IV						15 Jun - 01 Jul							
78	Audit			3 Desa Kecamatan Ciampea (Desa Cibadak, Desa Banteng, Desa Cinangka)	IV						18 Jun - 30 Jun							
79	Audit			4 Desa Klapanunggal (Desa Bojong, Desa Kembang Kuning, Desa Lulut, Desa Klapanunggal)	IV						15 Jun - 01 Jul							
80	Audit	AUDIT KETAATAN PERANGKAT DAERAH PUTARAN I	Penilaian terhadap aspek keuangan dan aspek non keuangan yang meliputi aspek tugas pokok dan fungsi, aspek metode kerja dan aspek sumber daya manusia	DPMTSP	III						25 Jun - 10 Jul							
81	Monitoring	MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL SEMESTER I	Memastikan progres program strategis nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku	JKN & Sekolah Rakyat	I-IV						25 Jun - 1 Jul							
82	Reviu	REVIU RA PERUBAHAN RPKD 2026	Kesesuaian RPKD dengan RPJMD	Bappelitbangda	II							01 Jul - 14 Jul						
83	Reviu	REVIU HPS	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah ditetapkan dengan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.	1 PROYEK STRATEGIS	II							01 Jul - 14 Jul						
84	Audit	PROBITY AUDIT	Pencegahan korupsi pada pengadaan Barang dan Jasa Strategis (kegiatan pengadaan barang dan jasa yang merupakan proyek strategis daerah).	1 PROYEK STRATEGIS	II							01 Jul - 14 Jul						
85	Monev	Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Nasional - Makan Bergizi Gratis		MAKAN BERGIZI GRATIS KOPERASI DESA MERAH PUTIH	I - IV							1 Jul - 15 Jul						
86	Monev	Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Nasional - KDKMP		KDKMP (Desa dan Kelurahan)	I							1 Jul - 15 Jul						
87	Reviu	Reviu DAU Pendanaan Kelurahan Tahap I 2026		Tahap I 2026	I							1 Jul - 7 Jul						
88	Evaluasi	Evaluasi RB TW II		Tahap II	I							1 Jul - 7 Jul						

NO	JENIS	URAIAN	TUJUAN	RUANG LINGKUP	ITBAN PENGAMPU	JADWAL PENUGASAN											
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
89	Reviu	REVIU DAU BIDANG KESEHATAN	Memperoleh keyakinan terbatas bahwa syarat salur Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Kesehatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Kesehatan	III							02 Jul - 10 Jul					
90	Audit	AUDIT KINERJA	Menilai Keberhasilan Sasaran RPJMD "Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan" telah dilaksanakan secara Efisien, Efektif dan Ekonomis, dan sesuai dengan Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan yang Berlaku	Dinas Pendidikan & Dinas Arsip Perpustakaan	IV							6 Jul - 31 Jul					
91	Audit	AUDIT KETAATAN PERANGKAT DAERAH	Penilaian terhadap aspek keuangan dan aspek non keuangan yang meliputi aspek tugas pokok dan fungsi, aspek metode kerja dan aspek sumber daya manusia	Dinas Ketahanan Pangan	IV							6 Jul - 24 Jul					
92	Reviu	REVIU DAU BIDANG PENDIDIKAN	Memperoleh keyakinan terbatas bahwa syarat salur Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pendidikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Pendidikan & Dinas Pemuda dan Olahraga	IV							6 Jul - 10 Jul					
93	Reviu	REVIU RENJA 2027	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam dokumen rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan sehingga dapat menghasilkan dokumen Renja yang berkualitas	Bappelitbangda	II							07 Jul - 20 Jul					
94	Reviu	REVIU RENJA 2027	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam dokumen rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan sehingga dapat menghasilkan dokumen Renja yang berkualitas	20 Perangkat Daerah	I-IV							13 Jul - 24 Jul					
95	Reviu	REVIU RENJA 2027	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam dokumen rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan sehingga dapat menghasilkan dokumen Renja yang berkualitas	18 Perangkat Daerah	IV							13 Jul - 24 Jul					
96	Reviu	REVIU KUPA-PPAS PERUBAHAN 2026	Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana keuangan (tahunan) berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran	BPKAD	II							14 Jul - 20 Jul					
97	Reviu	REVIU RENJA PERUBAHAN 2026		SKPD & KECAMATAN PADA ITBAN I	I-IV							16 Jul - 31 Jul					
98	Reviu	REVIU KUA-PPAS 2027	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2027 telah disusun berdasarkan RKPD Tahun Anggaran 2027 dan didukung dengan Dokumen yang memadai serta penyusunannya telah sesuai dengan tatacara dan kaidah-kaidah perencanaan dan	BPKAD	II							21 Jul - 27 Jul					
99	Reviu	REVIU RA PERUBAHAN RENJA 2026	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam dokumen rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2026 telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan sehingga dapat menghasilkan dokumen Renja Perubahan yang berkualitas	Bappelitbangda	II							21 Jul - 3 Agu					

NO	JENIS	URAIAN	TUJUAN	RUANG LINGKUP	ITBAN PENGAMPU	JADWAL PENUGASAN												
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
100	Reviu	REVIU RENJA PERUBAHAN 2026	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam dokumen rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2026 telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan sehingga dapat menghasilkan dokumen Renja yang berkualitas	20 Perangkat Daerah	I-IV								27 Jul - 7 Ags					
101	Reviu	REVIU RENJA PERUBAHAN 2026	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam dokumen rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2026 telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan sehingga dapat menghasilkan dokumen Renja yang berkualitas	18 Perangkat Daerah	IV								27 Jul - 7 Agu					
102	Reviu	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)	Memberikan keyakinan terbatas bahwa nilai KDP yang disajikan dalam laporan keuangan akurat, sah, sesuai standar akuntansi (SAP), serta memastikan fisik pekerjaan benar-benar ada dan progresnya sesuai kontrak.	Dinas Pendidikan	IV								27 Jul - 31 Jul					
103	Monev	MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	Memastikan progres program strategis nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan	Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi	IV								3 Agu - 7 Agu					
104	Evaluasi	EVALUASI KEANDALAN RISK REGISTER TAHUN 2027	Pengujian kecukupan dan kewajaran infrastruktur penerapan manajemen risiko yang dibuat Perangkat Daerah berupa pernyataan risiko, penilaian risiko, rencana tindak pengendalian.	18 Perangkat Daerah	IV								3 Agu - 7 Agu					
105	Reviu	REVIU RENJA 2027		SKPD & KECAMATAN PADA ITBAN I	I-IV								3 Ags - 14 Ags					
106	Evaluasi	PENILAIAN MANDIRI K-APIP	PM Kapabilitas APIP dilakukan dengan tujuan menentukan tingkat kapabilitas APIP pada Pemerintah Kabupaten Bogor, dan memberikan saran peningkatan Kapabilitas APIP pada Pemerintah Kabupaten Bogor	INSPEKTORAT	II								3 Agu - 30 Sep					
107	Reviu	REVIU RKA PERUBAHAN 2026	Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana keuangan (tahunan) berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran	BPKAD	II								5 Agu - 19 Agu					
108	Reviu	REVIU RKA PERUBAHAN 2026	Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana keuangan (tahunan) berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran	20 Perangkat Daerah	I-IV								10 Ags - 24 Ags					
109	Reviu	REVIU RKA PERUBAHAN 2026	Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana keuangan (tahunan) berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran	18 Perangkat Daerah	IV								10 Ags - 25 Ags					
110	Reviu	REVIU RKA PERUBAHAN 2026		SKPD & KECAMATAN PADA ITBAN I	I-IV								18 Ags - 31 Ags					
111	Reviu	REVIU RKA 2027	Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana keuangan (tahunan) berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran	BPKAD	II								20 Ags - 3 Sep					
112	Reviu	REVIU RKA 2027	Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana keuangan (tahunan) berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran	20 Perangkat Daerah	I-IV								26 Ags - 8 Sep					
113	Reviu	REVIU RKA 2027	Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana keuangan (tahunan) berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran	18 Perangkat Daerah	IV								26 Ags - 8 Sep					
114	Reviu	REVIU RKA 2027		SKPD & KECAMATAN PADA ITBAN I	I-IV									1 Sep - 14 Sep				

NO	JENIS	URAIAN	TUJUAN	RUANG LINGKUP	ITBAN PENGAMPU	JADWAL PENUGASAN												
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
115	Audit	AUDIT DESA PUTARAN IV	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Bantuan Keuangan pada Desa-Desa di Kabupaten Bogor	Kec. Ciseeng (Ds. Ciseeng, Ds. Putat Nutug, Ds. Babakan)	II									7 Sep - 17 Sep				
116	Audit			Kec. Ciomas (Ds. Ciapus, Ds. Ciomas, Ds. Sukamakmur)	II									7 Sep - 17 Sep				
117	Audit			Kec. Cigudeg (Ds. Sukamaju, Ds. Wargajaya, Ds. Sukaraksa)	II										7 Sep - 17 Sep			
118	Monitoring	MONITORING TINDAK LANJUT INSPEKTORAT III	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Seluruh entitas yang diperiksa	I-IV									9 Sep - 11 Sep				
119	Monitoring	MONITORING TINDAK LANJUT INSPEKTORAT SEMESTER I TAHUN 2026	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Seluruh Entitas yang diperiksa	IV									9 Sep - 11 Sep				
120	Evaluasi	EVALUASI PENGELOLAAN RISIKO TAHUN 2026	Menilai kecukupan rancangan dan efektivitas penerapan manajemen risiko, memastikan mitigasi berjalan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Ini bertujuan meningkatkan pencapaian tujuan organisasi, memberikan keyakinan pada stakeholder, dan meminimalkan dampak risiko.	76 Perangkat Daerah	IV									9 Sep - 29 Sep				
121	Fasilitasi	TELAH SEJAWAT			IV									14 Sep - 25 Sep				
122	Evaluasi	EVALUASI RR 2027	Pengujian kecukupan dan kewajaran infrastruktur penerapan manajemen risiko yang dibuat Perangkat Daerah berupa pernyataan risiko, penilaian risiko, rencana tindak lanjut	20 Perangkat Daerah	I-IV									14 Sep - 25 Sep				
123	Fasilitasi	TELAH SEJAWAT			I-IV									14 Sep - 25 Sep				
124	Evaluasi	EVALUASI RR		SKPD & KECAMATAN PADA ITBAN I	I-IV									15 Sep - 28 Sep				
125	Reviu	REVIU TATA KELOLA BMD	Memberikan Keyakinan Terbatas Pengelolaan Barang Milik Daerah/Pencegahan telah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	BPKAD	II									21 Sep - 16 Okt				
126	Reviu	REVIU MANAJEMEN ASN	Reviu Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, dan Mutasi ASN	BKPSDM	II									21 Sep - 25 Sep				
127	Reviu	REVIU HPS	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah ditetapkan dengan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.	1 PROYEK STRATEGIS	II									28 Sep - 16 Okt				
128	Audit	PROBITY AUDIT	Pencegahan korupsi pada pengadaan Barang dan Jasa Strategis (kegiatan pengadaan barang dan jasa yang merupakan proyek strategis daerah).	1 PROYEK STRATEGIS	II									28 Sep - 16 Okt				
129	Audit	AUDIT DESA PUTARAN IV	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Bantuan Keuangan pada Desa-Desa di Kabupaten Bogor	Kec. Tajurhalang (Ds. Sukmajaya, Ds. Kalisuren)	II									28 Sep - 16 Okt				
130	Audit	AUDIT KETAATAN PERANGKAT DAERAH PUTARAN II	Penilaian terhadap aspek keuangan dan aspek non keuangan yang meliputi aspek tugas pokok dan fungsi, aspek metode kerja dan aspek sumber daya manusia	Bappenda (Audit Optimalisasi Pajak)	I-IV									28 Sep - 16 Okt				
131	Audit			Dinas Lingkungan Hidup	I-IV										28 Sep - 13 Okt			
132	Audit			Dinas Sosial	I-IV											28 Sep - 13 Okt		
133	Audit	AUDIT KETAATAN PERANGKAT DAERAH PUTARAN I		DPU, DISHUB	I									29 Sep - 19 Okt				

NO	JENIS	URAIAN	TUJUAN	RUANG LINGKUP	ITBAN PENGAMPU	JADWAL PENUGASAN											
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
134	Audit	AUDIT KETAATAN PERANGKAT DAERAH PUTARAN II	Penilaian terhadap aspek keuangan dan aspek non keuangan yang meliputi aspek tugas pokok dan fungsi, aspek metode kerja dan aspek sumber daya manusia	Dinas Pemuda dan Olahraga	IV											01 Okt - 21 Okt	
135	Audit			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	IV												
136	Evaluasi	Evaluasi RB TW III		Tahap III	I											5 Okt - 9 Okt	
137	Reviu	REVIU PELAYANAN PUBLIK (LAYANAN RSUD)	Memperoleh keyakinan terbatas bahwa layanan RSUD telah dilaksanakan sesuai	RSUD Leuwiliang	III											19 Okt - 30 Okt	
138	Audit	AUDIT DESA PUTARAN IV	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Penyaluran Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa dan Dana Desa sebagai Bentuk dari Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	3 Desa Kecamatan Tenjolaya (Gunung Mulya, Tapos I, Tapos II)	I-IV											19 Okt - 29 Okt	
139	Audit			3 Desa Kecamatan Ranca Bungur (Pasirgaok, Candali, Cimulang)	I-IV												
140	Audit	AUDIT KETAATAN PERANGKAT DAERAH PUTARAN II		DISKOMINFO, SATPOL PP, DISDUKCAPIL	I											20 Okt - 9 Nov	
141	Audit	AUDIT HONOR TERTINGGI DAN PERJADIN TERTINGGI	Pencegahan terjadinya penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas yang fiktif dan/ atau berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara		II											21 Okt - 10 Nov	
142	Audit	AUDIT HONORARIUM TERTINGGI	Pencegahan terjadinya penggunaan anggaran honorarium yang fiktif dan/atau berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	IV											22 Okt - 04 Nov	
143	Audit	AUDIT PERJALANAN DINAS TERTINGGI	Pencegahan terjadinya penggunaan anggaran perjalanan dinas yang fiktif dan/atau berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara	Dinas Pendidikan	IV											22 Okt - 04 Nov	
				Dinas Pemuda dan Olahraga	IV												
144	Reviu	REVIU DAU BIDANG KESEHATAN	Memperoleh keyakinan terbatas bahwa syarat salur Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Kesehatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Kesehatan	III											02 Nov - 06 Nov	
145	Evaluasi	TELAAH INTERNAL			I-IV											02 Nov - 06 Nov	
146	Audit	AUDIT BUMD	Penilaian terhadap aspek keuangan dan aspek non keuangan yang meliputi aspek tugas pokok dan fungsi, aspek metode kerja dan aspek sumber daya manusia	PD. Pasar Tohaga	II-IV											02 Nov - 17 Nov	
147	Audit	AUDIT KETAATAN PERANGKAT DAERAH PUTARAN III	Penilaian terhadap aspek keuangan dan aspek non keuangan yang meliputi aspek tugas pokok dan fungsi, aspek metode kerja dan aspek sumber daya manusia	Dinas Kesehatan	I-IV											02 Nov - 13 Nov	
148	Reviu	REVIU DAU BIDANG PENDIDIKAN	Memperoleh keyakinan terbatas bahwa syarat salur Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pendidikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga	IV											9 Nov - 13 Nov	
149	Evaluasi	TELAAH INTERNAL			IV											9 Nov - 13 Nov	
150	Audit	AUDIT BUMD	Pemeriksaan bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan usaha unit bisnis dan kinerja pada BUMD telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Perumda Air Minum Tirta Kahirupan	IV											9 Nov - 27 Nov	
151	Audit	AUDIT KETAATAN PERANGKAT DAERAH PUTARAN III	Penilaian terhadap aspek keuangan dan aspek non keuangan yang meliputi aspek tugas pokok dan fungsi, aspek metode kerja dan aspek sumber daya manusia	Dinas Perikanan dan Peternakan	IV											9 Nov - 27 Nov	
152	Audit	AUDIT PERJALANAN DINAS ANGGARAN TERTINGGI		SETWAN	I											10 Nov - 23 Nov	
153	Audit	AUDIT KETAATAN PERANGKAT DAERAH PUTARAN III		BAKESBANGPOL, DPMD	I											10 Nov - 30 Nov	

NO	JENIS	URAIAN	TUJUAN	RUANG LINGKUP	ITBAN PENGAMPU	JADWAL PENUGASAN											
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
154	Audit	AUDIT PERANGKAT DAERAH II	Memproleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.	DPKPP	II												11 Nov - 1 Des
155	Monev	MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL SEMESTER II	Memastikan progres program strategis nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku	JKN & Sekolah Rakyat	I-IV												16 Nov - 20 Nov
156	Monitoring	MONITORING TINDAK LANJUT INSPEKTORAT IV	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Seluruh entitas yang diperiksa	I-IV												16 Nov -18 Nov
157	Monev	MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL SEMESTER II	Memastikan progres program strategis nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi	IV												01 Des - 7 Des
158	Monitoring	MONITORING TINDAK LANJUT INSPEKTORAT SEMESTER II TAHUN 2026	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Seluruh Entitas yang diperiksa	IV												01 Des - 7 Des
159	Audit	AUDIT KETAATAN BUMD		PT SAYAGA WISATA BOGOR	I												1 Des - 21 Des
160	Audit	AUDIT KETAATAN RSUD		RSUD CIAWI	I												1 Des - 21 Des
161	Monev	Monitoring dan Evaluasi Terhadap Program Strategis Nasional	Memantau Program Strategis Nasional Terkait Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Proyek Pembangunan 3 Juta Rumah	BAPPERIDA dan DPKPP	II												2 Des - 15 Des
162	Reviu	REVIU HPS	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah ditetapkan dengan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah	1 PROYEK STRATEGIS	II												2 Des - 15 Des
163	Audit	PROBITY AUDIT	Pencegahan korupsi pada pengadaan Barang dan Jasa Strategis (kegiatan pengadaan barang dan jasa yang merupakan proyek strategis)	1 PROYEK STRATEGIS	II												2 Des - 15 Des
164	Evaluasi	EVALUASI RISK REGISTER	Pengujian kecukupan dan kewajaran infrastruktur penerapan manajemen risiko yang dibuat Perangkat Daerah berupa nerwataan risiko penilaian risiko rencana	7 PD dan 10 KECAMATAN	II												15 Des - 30 Des
165	Monitoring	MONITORING TINDAK LANJUT	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil	72 PD - 416 DESA	II												16 Des - 23 Des
166	Monitoring	MONITORING PEMUTAKHIRAN TL HASIL PEMERIKSAAN		Desa dan Perangkat Daerah	I												22 Des - 30 Des
167	Audit	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Memperoleh bukti/data dan informasi dalam rangka mengungkapkan terbukti atau tidak terbuktinya materi pengaduan masyarakat	Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan WBS	V												
168	Audit	Penanganan Kerugian Negara	Untuk menyatakan pendapat profesional	Penghitungan nilai kerugian riil negara akibat	V												
169	Audit	Penanganan TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi)	Memastikan penggantian kerugian negara/daerah yang ditimbulkan oleh bendahara atau pegawai.	Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara, pengelola/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang melakukan perbuatan melawan hukum (sengaja/lalai) yang mengakibatkan kerugian uang, surat berharga, atau barang milik negara/daerah.	V												02 Jan - 31 Desember
170	Monitoring	Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	Memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel oleh auditi.	Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP	V												
171	Fasilitasi	Koordinasi Pencegahan Korupsi dengan APH (KPK, BPK, Kepolisian, Kejaksaan)	Menciptakan sinergi dalam penanganan laporan masyarakat, mempercepat penanganan kasus korupsi/penyalahgunaan wewenang.	Laporan masyarakat, Pelimpahan Pengaduan dari Instansi lainnya	V												05 Jan - 31 Desember
172	Advisory	Sosialisasi Antikorupsi Perangkat Daerah	Mengedukasi dampak negatif korupsi/gratifikasi, mencegah tindakan pidana, dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta pegawai dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.	ASN pada Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, para Kepala Desa dan Perangkat Desa	V												26 Februari - 12 November

NO	JENIS	URAIAN	TUJUAN	RUANG LINGKUP	ITBAN PENGAMPU	JADWAL PENUGASAN													
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES		
173	Advisory	Sosialisasi Antikorupsi Kecamatan dan Desa	Menedukasi dampak negatif korupsi/gratifikasi, mencegah tindakan pidana, dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta pegawai dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.	ASN pada Kecamatan, Kelurahan, para Kepala Desa dan Perangkat Desa	V													12 Februari - 05 November	
174	Advisory	Rangkalan dan Puncak HAKORDIA	Menedukasi dampak negatif korupsi/gratifikasi, mencegah tindakan pidana, dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta pegawai dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.	ASN	V														23 - 30 Nov



ARIF RAHMEN, S.H., M.H., CGCAE
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19750713 200212 1 008